**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN
UPAYA PAKSA DALAM TAHAP PENYELIDIKAN
PADA PEMERIKSAAN TELEPON SELULER
MASYARAKAT**

Oleh: Alfis Suseno

Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.

Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Kembang Selasih No. 18 Pekanbaru

Email/Telepon: alfissuseno19@gmail.com/082286365642

ABSTRACT

Constitution gives authority to certain officials to control the individual freedom and independence in any action. Limitation on individual freedom and independence is a force action which has to be done to follow the constitution rules. The criminal procedure code has determined that there are several forced actions that connected with the occurrence of a criminal act committed by a person, one of which is a inquiry. The police in conducting searches ignore human rights and ignores the principle of presumption of innocence, then the law enforcement process will not run effectively. Not according to proper procedures. We often encounter searches or examinations of cell phones in the investigation process, such as police, such as police actions in conducting cell phone checks on the highway at night. There are certain absolute limitations for investigators to carry out inspections of cell phones, because there are rights for the person being examined, which is a person's right to privacy that is protected by laws and regulations. Of course, in someone's cell phone there are many privacy things that should not be allowed to be seen or known by others.

This type of research is classified as normative legal research with the type of legal principles. In normative legal research, the data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collection of normative legal research data uses data collection techniques using library research. The data obtained through the literature study will be analyzed qualitatively. In writing conclusions, the author uses the deductive method which writes conclusions from a general statement or proposition into a specific statement.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded. First; The examination of a person's cellphone by the Ambarita police can be said to be a forced inquiry. Body inquiry has its own guidelines which are regulated in the National Police Chief No. 8 of 2009 about the Implementation of Principles and Standards Police officers are also prohibited from carrying out excssive searches and causing disruption of the right to privacy being searched. Should be noted that a search only can be done if a person is strongly suspected of committing a criminal act regulated in the legislation. Reasonless search results in a violation of a person's human rights. Second, To search someone's cell phone arbitrarily and not according to procedure can be categorized as a violation of professional ethics.

Keywords: coercion-inquiry-cellphone

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Polisi sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal dibidangnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.¹

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pejabat tertentu untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan seseorang dalam berbagai bentuk kegiatan. Pembatasan kebebasan dan kemerdekaan ini merupakan suatu tindakan atau upaya paksa yang harus dilakukan dalam rangka mengikuti perintah Undang-Undang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan adanya beberapa tindakan atau upaya paksa yang dapat dilakukan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbagai upaya paksa tersebut adalah tindakan penangkapan, tindakan penahanan, tindakan penggeledahan, tindakan penyitaan dan tindakan pemeriksaan surat, tetapi tentunya harus ada alasan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan berbagai upaya paksa tersebut,² dikarenakan penegakan hukum

¹ Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukum)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 3.

² Hartati S. Nus, "Penangkapan Dan Penahanan Sebagai Upaya Paksa Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. V, No. 4 April-Juni 2016, hlm. 60.

merupakan kegiatan keorganisasian yang secara ketat dituntut batasan-batasannya oleh hukum.³

Apabila Polisi dalam melakukan penggeledahan mengabaikan hak asasi manusia dan mengabaikan pula asas praduga tak bersalah, maka proses penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Kemungkinan dan kekhawatiran terbesar yakni adanya kecenderungan bahwa pelaku yang akan ditangkap dapat diperlakukan secara *diskriminatif* atau tidak manusiawi, tidak sesuai prosedur sebagaimana mestinya. Jadi, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui organ penegak hukumnya pun tidak akan tercapai, karena apabila secara proseduralnya saja sudah tidak benar, bagaimana mungkin seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana akan memperoleh keadilan dihadapan hukum. Sedangkan cita-cita hukum menginginkan keadilan bagi setiap individu meskipun seorang pelaku yang diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum.⁴

Pengeledahan terhadap telepon seluler sangat sering kita jumpai dalam proses penyelidikan seperti tindakan polisi dalam melakukan pemeriksaan telepon seluler remaja yang sedang berkumpul-kumpul pada malam hari. Tentunya ada batasan-batasan tertentu bagi penyelidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap telepon seluler yang mana disini juga ada hak privasi seseorang yang dilindungi peraturan Perundang-Undangan. Tentunya didalam telepon seluler seseorang banyak hal-hal

³ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 122.

⁴ Asep Suherman, Penangkapan Sebagai Bentuk Upaya Paksa Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Vol. 29, No.1 Januari 2020, hlm. 30-31.

privasi yang seharusnya tidak diperkenankan untuk dilihat ataupun diketahui oleh orang lain.

Telepon seluler adalah sebuah barang privasi, tentunya masalah privasi ini dilindungi Undang-Undang. Perlindungan atas hak privasi seseorang tersebut dinyatakan dan dilindungi oleh Negara dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 (1) huruf I, Pasal 32 (2) huruf b,c,d, dan Pasal 38 (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Permasalahan penggeledahan orang dan pemeriksaan telepon seluler oleh Polisi adalah hal yang harus sangat jelas bagaimana mekanisme seharusnya. Pemeriksaan telepon seluler oleh Polisi tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan menyangkut ada hak asasi dari orang yang bersangkutan dikesampingkan. Maka, hak asasi tetap harus dijaga dan dilidungi dari perbuatan *diskriminatif* saat proses pemeriksaan itu dilakukan serta harus ada batasan-batasan upaya paksa yang diperbolehkan dilakukan oleh penyidik selaku aparat penegak hukum.

Dari uraian kasus seperti yang telah dijelaskan diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian

hukum dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Upaya Paksa Dalam Tahap Penyelidikan Pada Pemeriksaan Telepon Seluler Masyarakat**”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dapat dibenarkan penggunaan upaya paksa oleh polisi dalam tahap penyelidikan pada pemeriksaan telepon seluler masyarakat?
2. Apa akibat hukum atas pemeriksaan telepon seluler yang dilakukan oleh Polisi dalam tahap penyelidikan pada pemeriksaan telepon seluler masyarakat?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui tata cara penggunaan upaya paksa yang dibenarkan oleh Kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP).
- b. Untuk mengetahui akibat hukum atas pemeriksaan telepon seluler yang dilakukan oleh Polisi.

2. Kegunaan

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- c. Dapat dijadikan sebagai studi banding bagi para praktisi dalam pengambilan keputusan (*decision making*) khususnya dalam bentuk penggeledahan oleh Kepolisian.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Di Indonesia, hak asasi manusia (HAM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Theo Huijbers membedakan hak kodrati ke dalam 2 bagian, yaitu hak manusia (*Human Rights*) dan hak undang-undang (*Legal Rights*). Hak manusia adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia, sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia sendiri. Hak manusia tidak dapat direbut atau dicabut karena sudah ada sejak manusia itu ada. Sedangkan hak Undang-Undang adalah hak yang melekat pada manusia karena diberikan oleh Undang-Undang, maka pelanggaran hak ini dapat dituntut di pengadilan berdasarkan Undang-Undang.⁵

Dengan pengaturan hukum yang ada maka pada dasarnya manusia adalah sama terutama di mata hukum, maka tidak boleh ada perbedaan dalam pemberian jaminan atau perlindungan hak asasi manusia tersebut. Pembatasan dalam ketentuan hak asasi manusia dapat terjadi berhubungan dengan keadaan darurat. Dalam hal ini diperkenankan untuk sementara waktu membatasi hak asasi manusia yaitu dalam hal perang atau keadaan darurat umum (*public emergency*) yang mengancam keselamatan Negara. Namun, ada pula beberapa hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi, meskipun dalam keadaan darurat sekalipun, hak semacam ini disebut *non derogable rights*. Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun mencakup: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi terhadap hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut. Selain itu *non derogable rights* ditambah lagi dengan hak-hak lain seperti untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang (*arbitrary arrest*), hak akan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*fair and impartial trial*), dan beberapa yang lain lagi.⁶

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerja sama dan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu.⁷ Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Mardjono mengemukakan tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:⁸ (a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b)

⁵ Theo Huijbers dan Abdulkarim Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 8-10.

⁶ Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 190.

⁷ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 20.

⁸ Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm. 14.

Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegaskan dan yang bersalah pidana, (c) Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Ketertarikan antara subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang integrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem peradilan pidana memiliki dua (2) tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari, meneliti, menyelidiki sesuatu dengan menggunakan norma-norma berlaku.¹⁰
2. Pemeriksaan adalah sebuah proses, cara, perbuatan memeriksa.¹¹
3. Penyelidik, berdasarkan Pasal 4 KUHAP Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan

hukum, dan sejarah hukum.¹² Penelitian ini berfokus pada pengkajian mengenai penelitian terhadap asas-asas hukum penggunaan upaya paksa dalam tahap penyelidikan pada pemeriksaan telepon seluler masyarakat yang sedang berkumpul pada jam malam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian normatif menggunakan sumber data sekunder.

Data sekunder dalam penulisan ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas

⁹Tolib Effendi, *Op.cit*, hlm. 25.

¹⁰ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

¹¹ <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal, 17 Desember 2020.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum. Termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas Putusan Hakim.¹³

c. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus, internet dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data ini peneliti rangkum dengan membuat pengelompokan berdasarkan jenis-jenis dari berbagai sumber yang dalam penelitian hukum normatif, data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* (apa yang dinyatakan secara tertulis), yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, kemudian setelah itu melakukan proses analisis data secara *kulitatif*. Peneliti menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyelidikan

1. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP BAB 1 ketentuan umum pasal 1 butir (5) yang berbunyi: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini"

2. Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta : 2012, hlm. 119.

mengatur mengenai tindak pidananya.¹⁴

Menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu,¹⁵ Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pengeledahan dalam KUHAP

1. Pengeledahan dan Dasar Hukum Pengeledahan dalam KUHAP

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan Undang-Undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan, tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan.¹⁷

¹⁴ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

¹⁵ Sahuri Lasmadi, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 112.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,

Dengan redaksi yang agak berbeda, dalam *Kamus Hukum* disebutkan bahwa pengeledahan badan yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita. Sedangkan pengeledahan rumah yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk dilakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan dan untuk penangkapan dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁸ Pengeledahan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti untuk disita.

Dasar hukum penyidik untuk melakukan pengeledahan pada hakekatnya secara yuridis pengeledahan diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf (b) angka (1), Pasal 7 ayat (1) huruf (d), Pasal 11, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 75, Pasal 125, dan Pasal 126. Sasaran Pengeledahan adalah rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya, pakaian, serta badan.

2. Tata Cara Pengeledahan dalam KUHAP

a) Pengeledahan Biasa

Pengeledahan biasa diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Tata cara pengeledahan yang diatur dalam Pasal 33 pada dasarnya merupakan aturan pedoman pengeledahan.

Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 249.

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 350.

Tata cara penggeledahan dalam hal biasa.

- a. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- b. Petugas Kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas;
- c. Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping/saksi dari penghuni rumah / RT / RW / warga setempat;
- d. Kewajiban membuat berita acara penggeledahan (Diatur dalam Pasal 126 dan 127 KUHAP);
- e. Penjagaan rumah atau tempat. Hal ini diatur dalam Pasal 127 KUHAP yang memberikan wewenang kepada penyidik;

b) Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak

Hal ini diatur dalam Pasal 34 KUHAP yang menegaskan: dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk lebih dulu mendapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri, penyidik dapat langsung bertindak mengadakan penggeledahan.

Tata cara penggeledahan dalam keadaan mendesak:

- a. Penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada izin ketua Pengadilan Negeri.
- b. Dalam tempo dua hari setelah penggeledahan, penyidik membuat berita acara, yang berisi jalanya dan hasil penggeledahan
- c. Kewajiban penyidik segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri dan meminta persetujuan atas

penggeledahan yang telah dilakukan

c) Penggeledahan Badan

Untuk mengetahui sejauh mana penggeledahan badan, harus menggabungkan Pasal 1 butir 18 dengan penjelasan Pasal 37 KUHAP, dengan pengembangan pasal 1 butir 18 dengan penjelasan pasal 37 KUHAP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah meliputi seluruh bagian badan luar dan dalam, meliputi bagian luar badan dan pakaian serta juga bagian dalam, termasuk seluruh anggota badan.

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1) Pengertian dan Konsep Sistem Peradilan Pidana

Criminal justice system merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sistem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sub sistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2) Asas Peradilan Pidana di Indonesia .

- a. Asas sederhana, artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan

penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

- b. Asas peradilan cepat, artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Makna dari asas cepat yaitu bahwa proses keseluruhan peradilan dari tahap awal sampai akhir haruslah cepat dimana dapat dimaknai sebagai efisiensi dan efektivitas dalam hal waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Peradilan cepat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dalam konvensi tersebut diatur tentang persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan pidana. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “untuk diadili tanpa penundaan” selanjutnya pada Pasal 9 paragraf 3 Kovenan tersebut juga mengatur bahwa salah satu tujuan dari prinsip peradilan yang cepat adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa (untuk tidak ditahan terlalu lama serta memastikan adanya kepastian hukum baginya).¹⁹

- c. Asas biaya ringan, yang dimaksud dengan biaya ringan dalam peradilan pidana adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dari segala lapisan sehingga hukum dan keadilan dapat dicapai oleh semua orang. Biaya hendaknya tidak dimaknai secara sempit mengenai biaya yang ada dalam proses persidangan yang ditentukan oleh Kepaniteraan Pengadilan saja, biaya tersebut dapat juga diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa dan keluarganya selama menjalani persidangan, biaya bolak-balik menjalani persidangan dll.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Penggunaan Upaya Paksa oleh Polisi dalam Tahap Penyelidikan pada Pemeriksaan Telepon Seluler Masyarakat

Didalam KUHAP tidak dijelaskan secara rinci pengertian dari upaya paksa walaupun demikian dapat disimpulkan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal melakukan penahanan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan kepada seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana, upaya paksa pada dasarnya mengesampingkan hak asasi dari tersangka untuk sementara waktu atas kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk melakukan upaya tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi Negara memberikan hak istimewa atau hak *privilege* kepada kepolisian untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita terhadap tersangka dan barang yang

¹⁹ Pasal 9 Paragraf 3 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights*.

dianggap berkaitan dengan tindak pidana.²⁰ Banyak masyarakat mengeluh terhadap upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan yang terkadang bertentangan dengan hak asasi manusia dan menyimpang dari ketentuan hukum acara atau diskresi yang dilakukan oleh penyidik.

Salah satu Penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian sudah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Penggeledahan. KUHAP ternyata memisahkan pengertian penggeledahan rumah dengan penggeledahan badan, sebagaimana kita jumpai dalam Pasal 1 angka 17 mengenai penggeledahan rumah dan Pasal 1 angka 18 mengenai penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atas penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.²¹

Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.²² Penggeledahan termaksud di atas dikelompokkan menjadi satu di dalam Pasal 32 KUHAP, yang berbunyi; "untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara

yang ditentukan dalam Undang-Undang ini."

Memperhatikan Pasal 32 maka penggeledahan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Untuk itu maka semua ketentuan mengenai penyidikan pada umumnya dan mengenai penggeledahan pada khususnya sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP haruslah dipatuhi. Pasal 33 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa penggeledahan rumah dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan Negeri setempat ialah Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat penggeledahan dilakukan.

Pemeriksaan telepon seluler seseorang yang dilakukan oleh kepolisian seperti pada kasus Aipda Ambarita dapat dikatakan suatu upaya paksa penggeledahan. Permasalahan mengakses ponsel orang lain telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penggeledahan badan memiliki pedoman tersendiri yang diatur pada privasi seseorang sudah sewajibnya dihormati berdasarkan Pasal 32 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai tata cara penggeledahan orang.

Patut diperhatikan bahwa penggeledahan hanya dapat dilakukan apabila seseorang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Perundangan-Undangan. Penggeledahan tanpa dasar tersebut berakibat pelanggaran hak asasi seseorang. Maka dari itu, upaya-upaya

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Op.cit.*, Jakarta hlm.95.

²¹ Pasal 1 Butir 17, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²² Pasal 1 butir 18, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

paksa tidak perlu dilakukan oleh penyidik pembantu, dan penyidik apabila dianggap belum atau tidak mengganggu tugasnya untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan.²³ Kemudian, perlu dipahami bahwasannya sama halnya dengan penangkapan, wewenang pengeledahan semata-mata hanya diberikan kepada penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil.²⁴

B. Akibat Hukum Atas Pemeriksaan Telepon Seluler yang Dilakukan oleh Kepolisian dalam Tahap Penyelidikan pada Pemeriksaan Telepon Seluler Masyarakat

Pemeriksaan telepon seluler termasuk kedalam upaya paksa pengeledahan badan. Pengeledahan menjadi salah satu upaya paksa terhadap tersangka, dalam rangka pencarian alat bukti. Anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak boleh melanggar Peraturan Disiplin Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Kode Etik Polri yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Kode Etik Profesi Polri, disebutkan bahwa setiap anggota Polri harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan masyarakat sekitarnya. Di samping itu, setiap insan Polri juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan penyalahgunaan

wewenang.²⁵ Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila ada anggota polisi yang melakukan pelanggaran dan terbukti melanggar Kode Etik Profesi maka akan dijatuhi sanksi melalui Komisi Kode Etik Polri berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Dalam berhubungan dengan masyarakat anggota Polri seringkali menyalahgunakan wewenang dan melakukan tindakan yang berlebihan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan. Kode Etik Profesi Polri mengandung jbaran pedoman perilaku setiap anggota Polri dalam berhubungan dengan masyarakat, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun ketika tidak sedang menjalankan tugas dan wewenangnya di tengah-tengah masyarakat. Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dijabarkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kekuatan mengikat, yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral.

Salah satu contoh kasus yang masih hangat diperbincangkan terkait kasus yang Aipda Ambarita, yang memaksa memeriksa telepon seluler seorang pemuda secara arogan tanpa menjelaskan secara rinci wewenang dari kepolisian untuk memeriksa telepon seluler. Melihat kasus yang terjadi, perlu kiranya melihat kembali bagaimana pengaturan terkait pengeledahan dalam Sistem Peradilan

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Acara Pidana (Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya)*, PT Rafika Aditama, Bandung:2021, hlm. 67.

²⁴ Ibid, hlm. 85.

²⁵ Muhammdad. Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 144.

Pidana di Indonesia. Pengaturan hukum terkait kewenangan upaya paksa penggeledahan sudah jelas dimuat dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP.

Gugatan praperadilan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat penggeledahan yang tidak sesuai dengan prosedur, misalnya pada kasus Aipda Ambarita, dimana seorang pemuda yang diperiksa oleh Aipda Ambarita saat melakukan razia malam, dimana Aipda Ambarita yang mengambil dan memeriksa isi telepon seluler pemuda tersebut, padahal pemuda tersebut telah menolak, sebab menurut pemuda tersebut itu ranah privasinya dan terlebih pemuda itu juga merasa tidak melakukan tindak pidana. Hal ini tentu membuat pemuda tersebut merasa dirugikan atas tindakan Aipda Ambarita yang sewenang-wenang dan arogan. Kewenangan penggeledahan dan batasan-batas penggeledahan itu sendiri sudah diatur dalam Pasal 32 sampai Pasal 37 KUHAP. Pasal 32 mengatur terkait kepentingan penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau pakaian atau badan menurut tata cara yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.

Terhadap kasus yang terjadi pada Aipda Ambarita menurut peneliti ada indikasi tindakan penggeledahan secara paksa dan sewenang-wenang terhadap privasi seseorang, terlebih penggeledahan yang dilakukan bukan bagian dari proses penyidikan karena sebagai bagian dari penyidikan, sehingga terlebih dahulu harus ada dugaan/perbuatan tindak pidana yang disidik dalam rangka pencarian alat bukti terhadap tersangka.

Dalam sistem demokratis, hak-hak khusus Polri ini bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku, namun juga harus tunduk pada Kode Etik Profesi sebagai aspek dalam

kepolisian. Kode Etik Profesi Kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi ketertiban umum, keamanan masyarakat, dan penegakkan hukum.²⁶

Sehubungan dengan tugas dan kewajiban tersebut, polisi mempunyai kewenangan sebagaimana sudah diatur dalam KUHAP juga diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Diatur juga tentang bagaimana manajemen penyidikan tindak pidana yang harus dilakukan oleh polisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi sebagai penyidik dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan, harus berdasar pada Surat Ketua Pengadilan Negeri. Namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, tindakan penggeledahan dapat dilakukan oleh polisi dengan tanpa membawa Surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Sementara, Aipda Ambarita saat itu bukan sebagai seorang penyidik yang dimaksudkan tersebut. Melainkan hanya seorang polisi yang sedang melaksanakan patroli bersama dengan timnya.

Selain itu tindakan penggeledahan tidak sesuai prosedur tersebut juga melanggar aturan internal Polri sendiri, pada Pasal 38 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas

²⁶ Sadjijono, *Etika Profesi Hukum : Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 78-87.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur kewajiban anggota Polri untuk menghormati martabat dan privasi seseorang.

KUHAP memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia khususnya upaya paksa penggeledahan, dalam hukum acara pidana dikenal adanya asas legalitas, berkenaan dengan asas legalitas segala tindakan kepolisian yaitu: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan tindakan-tindakan lainnya harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang serta dengan cara yang diatur menurut Undang-Undang, asas perintah tertulis ini disebutkan dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf b hal ini sama dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Apabila asas perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan diturut menurut tata cara yang diatur oleh KUHAP, tidak diikuti dengan seksama dan tertulis oleh para pejabat dalam tiap tingkat pemeriksaan, dapat menimbulkan akibat atau konsekuensi yang merugikan pihak lain.²⁷

Tindakan penggeledahan penyidik diatur dalam Pasal 32 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi manusia. Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:²⁸ Selain

²⁷ Martiman, Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cet Ke-1, Pradnya Paramitha: Jakarta, 1989, hlm. 23.

²⁸ Pasal 32 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

itu etika dalam kemasyarakatan juga diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian menjelaskan mengenai hukuman disiplin tersebut berupa (a) Teguran tertulis; (b) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; (c) Penundaan kenaikan gaji berkala; (d) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; (e) Mutasi yang bersifat demosi; (d) Pembebasan dari jabatan;

Penjelasan penjatuhan hukuman diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian, yang selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan apabila ada anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Polri maka akan disidang melalui Komisi Kode Etik Polri. Atas tindakan yang dilakukan Aipda Ambarita tersebut membuat Polda Metro Jaya turun tangan dan memeriksa Aipda Ambarita. Per 18 Oktober 2021, Ambarita pun mendapat mutasi melalui Surat Edaran Telegram bernomor ST/458/X/KEP./2021.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan upaya paksa oleh Polisi dalam tahap penyelidikan pada Pemeriksaan telepon seluler masyarakat merupakan suatu hal yang salah dikarenakan jika memperhatikan Pasal 32 KUHAP maka penggeledahan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Oleh karena itu tindakan polisi menggeledah secara paksa seseorang di tengah jalan,

dan bukan bagian dari proses penyidikan, dapat dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenang terhadap privasi seseorang. Privasi seseorang sudah sewajibnya dihormati berdasarkan Pasal 32 ayat 2 jo Pasal 38 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia.

2. Akibat hukum atas pemeriksaan telepon seluler yang dilakukan oleh Polisi dalam tahap penyelidikan pada pemeriksaan telepon seluler secara sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika profesi. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, menjelaskan mengenai hukuman disiplin tersebut berupa, teguran tertulis; penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan apabila ada anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran. Penjelasan penjatuhan hukuman diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian, yang selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan apabila ada anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Polri maka akan disidang melalui Komisi Kode Etik Polri.

B. Saran

1. Kepada penegak hukum bahwa hukum harus mampu berdampingan dengan hak asasi manusia

(kepentingan individu dan kepentingan publik), pemangku kewenangan atau negara tidak boleh melakukan diskriminatif terhadap kepentingan-kepentingan, karena hak asasi manusia dihormati oleh Negara, Undang-Undang, hukum sesuai prinsip Negara hukum yang demokratis.

2. Setiap penggeledahan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati serta harus sesuai dengan tujuan dan tata cara sebenarnya penggeledahan tersebut dalam batas-batas dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang agar tidak menimbulkan kerugian pada orang lain karena penggeledahan berkaitan dengan hak asasi seseorang serta hak milik pribadi seseorang yang dilindungi oleh hukum sehingga kepentingan penyidikan pun tetap dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zaidan, M, 2015 *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2021, *Hukum Acara Pidana (Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya)*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana (Perbandingan komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Harahap, Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Huijbers, Theo dan Abdulkarim Muhammad, 2007, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Martiman, Prodjohamidjojo, 1989, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cet Ke-1, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Nugroho, Hibnu, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.

Nuh, Muhammdad, 2011, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Pangaribuan, Luhut, 2013, *Hukum Acara Pidana: Suarat Resmi Adokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Rasijdi, Lili dan Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum : Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Suroso, Imam, 2016, *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukum)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus

Hartati S. Nus, "Penangkapan Dan Penahanan Sebagai Upaya Paksa Dalam Pemeriksaan

Perkara Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. V, No. 4 April-Juni 2016.

Depertemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI.